PEMETAAN DAERAH RAWAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

Teuku Fahmi[*)], M. Zaimuddin Akbar[**)]

[*)] *Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung*
[**)] *Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Tanggamus*

ABSTRACT

The study was carried out to obtain the anatomy of conflict and spreading patterns by region in Tanggamus, Lampung province. This study uses a quantitative approach. The data used is data intensity (frequency) for both that are still in the form of conflict or potential conflict that has occurred in Tanggamus in 2014. The results of this study indicate that (1) Tanggamus have a fairly wide area coverage from one region to another. The condition can be an opportunity or obstacle, even can also be a threat to the welfare of society. To that end, the provision of physical and non-physical infrastructure that is easily accessible/used by the public should be of particular concern for the stakesholders in Tanggamus. (2) Regarding to social conflict in Tanggamus, when referring to the data in the previous year (2014), showed that Tanggamus has the potential conflicts that quite alarming when it is not carried out a series of efforts to prevent conflict. The results of the identification of the data shows that there are 22 regions with the potential for conflict in this region. and; (3) There are variations in the background there is the potential for social conflict in Tanggamus, based on the field/category of potential conflict, it appears that at every district has a distinctive pattern. There is one case of potential conflict that comes from social factors, and in other cases the economic factor comes to land/agrarian.

Keywords: Mapping, social conflict

PENDAHULUAN

Ekskalasi konflik sosial di Indonesia pascaera reformasi 1998 memiliki pola yang khas. Pada medio 2012, Kemdagri merilis jumlah konflik sosial pada 2010 sebanyak 93 kasus. Kemudian menurun pada 2011 menjadi 77 kasus. Namun kemudian meningkat pada 2012 menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus (Antaranews, 2012). Bila ditelusuri lebih lanjut, terjadinya konflik sosial dikala itu cenderung disebabkan oleh lemahnya *sharing of understanding and acceptance* –meminjam istilah yang dikemukakan Suharto, 2005 – di tengah masyarakat yang menyangkut ruang, kekuasaan, ekonomi, dan kebudayaan.

Pada April 2014 lalu, Kementerian Sosial (Kemensos) merilis bahwa di Indonesia saat ini terdapat 42 titik rawan konflik sosial yang tersebar di enam pulau. Sepanjang 2013 lalu, di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, di Jawa Barat (24), di Jakarta (18), di

Sumatera Utara (10), di Sulawesi Tengah (10) dan di Jawa Tengah (10) (JPNN, 2014). Berkaca dari jumlah frekuensi terjadinya konflik sosial yang begitu intens, pada 2014 lalu, Kemensos juga melancarkan program keserasian sosial di 50 wilayah rawan konflik sosial dan program penguatan kearifan lokal di 30 daerah.

Konflik sosial pada masyarakat pluralisme seperti Indonesia, yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesajahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali seperti dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah.

Bila ditesuluri perihal sumber/asal-muasal konflik yang marak terjadi di Indonesia, sulit agaknya untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci akar permasalahan konflik tersebut. Namun demikian, beberapa peneliti mencoba melakukan klasifikasi guna menemukenali akar permasalahan konflik yang lazim terjadi di Indonesia. Sumarno dan Roebiyanto (2013) mengungkapkan bahwa terjadinya konflik, secara umum, disebabkan karena tiga faktor yaitu, motif sosial, motif ekonomi dan motif politik. Motif sosial, karena adanya sikap kurang saling menghormati antar warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, sehingga bila terjadi perbedaan kepentingan sosial dapat terjadi letupan sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Motif ekonomi dikarenakan adanya perbedaan kemampuan antar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam mendayagunakan sumber daya ekonomi yang ada dapat menjadikan konflik sosial di masyarakat. Motif politik karena adanya perbedaan kepentingan politik, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam proses perebutan kekuasaan dapat menimbulkan konflik sosial.

Untuk konteks Provinsi Lampung, pada tiga tahun terakhir, Lampung merupakan salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus terkait dengan ekskalasi dan intensitas konflik sosial yang relatif cukup tinggi. Realitas menunjukkan bahwa dinamika kemajemukan masyarakat Lampung banyak diwarnai oleh konflik-konflik kekerasan baik dalam konflik sosial vertikal maupun horizontal.

Secara khusus, hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki potensi konflik yang khas bila mengacu pada kondisi ditiap wilayah. Untuk konteks Kabupaten Tanggamus, Kesbangpol Provinsi Lampung di tahun 2014 telah mengidentifikasi setidaknya terdapat lima data konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Lingkup konflik yang terjadi mencakup batas wilayah, perambahan hutan, sengketa lahan, konflik perusahaan dengan masyarakat, hingga bentrok antarwarga. Bila mengacu data yang dirilis Kesbangpol Kabupaten Tanggamus, tahun 2014 lalu ditemui hampir 22 data daerah potensi konflik di wilayah ini. Realitas ini menujukkan bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki potensi konflik yang cukup mengkhawatirkan bila tidak dilakukan serangkaian upaya pencegahan konflik. Kajian ini dilakukan mendapatkan gambaran mengenai potensi konflik dan pola persebarannya berdasarkan wilayah (kecamatan) di Kabupaten Tanggamus. Lebih lanjut, tujuan kegiatan ini diperolehnya data dan informasi tentang peta konflik sosial potensial (latent) dan aktual (terbuka/ manifest) dengan melingkupi berbagai isu dan dimensinya pada tiap wilayah (kecamatan) di Kabupaten Tanggamus.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Pemetaan Sosial

Pemetaan sosial (*social mapping*) kini lazim digunakan sebagai satu pendekatan dalam penanganan masalah sosial. Bila ditelusuri secara harfiah, kata "pemetaan" merujuk pada proses, cara, perbuatan membuat peta, sedangkan kata "sosial" secara sederhana dimaknai berkenaan dengan masyarakat. Adapun secara terminologis, Suharto (2005) memberikan penjelasan bahwa pemetaan sosial merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistemik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyakat termasuk didalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada suatu masyarakat.

Lingkup pemetaan yang dilakukan pada kajian ini berusaha untuk menggambarkan wilayah (kecamatan) di Kabupaten Tanggamus berdasarkan potensi konflik yang ada pada ditiap wilayah. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tiap area di Kabupaten Tanggamus memiliki potensi konflik yang khas bila mengacu pada kondisi ditiap wilayah (kecamatan). Untuk itu, proses identifikasi potensi konflik berdasarkan wilayah (kecamatan) akan diwujudkan dalam bentuk peta wilayah.

Tinjauan tentang Konflik Sosial

Secara umum, konflik dimaknai sebagai gejala sosial yang kerap hadir dalam kehidupan sosial masyarakat. Kata "konflik" lazim dimaknai sebagai perselisihan atau pertentangan. Namun bila ditelusuri secara etimologis istilah "konflik" berasal dari bahasa Latin "*con*" yang berarti bersama dan "*fligere*" yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihal atau lebih (Setiadi dan Kolip, 2011). Secara terminologis, Jones (2008) menekankan bahwa konflik merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang saling terkait dalam usaha mereka memperoleh tujuan. Lebih lanjut, Jones (2008) juga mengemukakan bahwa konflik merupakan fenomena sosial yang menyangkut perselisihan antara pihak. Pihak yang terlibat dalam konflik dapat berupa skala individu, kelompok, organisasi, negara, atau bangsa.

Pembahasan pada beberapa konsepsi di atas, memberikan gambaran bahwa potensi konflik akan selalu ada di tengah masyarakat, tidak hanya pada komunitas yang multikultur. Dalam hal ini diperlukan upaya untuk menemukenali potensi konflik yang ada di tengah masyarakat tersebut. Konsepsi yang lazim gunakan dalam menemukenali situasi tersebut biasa dinyatakan sebagai upaya deteksi dini. Deteksi dini konflik merujuk pada penemuan dan pengenalan gejala dan sumber-sumber yang dianggap berpotensi memunculkan perbedaan pemahaman yang dapat berakibat munculnya konflik dan/atau kemungkinan munculnya konflik lanjutan (Rudito & Famiola, 2008).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam kajian ini yakni tipe deskriptif, dengan begitu diharapkan mampu untuk mengetahui dan menjelaskan peta potensi konflik sosial di Kabupaten Tanggamus. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Data yang digunakan ialah data intensitas (frekuensi) baik yang sifatnya masih berupa potensi konflik ataupun konflik yang telah terjadi di Kabupaten Tanggamus Tahun

2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sepenuhnya data sekunder. Data tersebut diperoleh dari lembaga pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Untuk lingkup ini, ada beberapa lembaga pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus yang merilis data konflik sosial di tahun 2014, diantaranya yakni: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanggamus dan Kepolisian Resort Tanggamus. Selain itu, digunakan juga data sekunder yang bersumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian Peristiwa Konflik Sosial di Kabupaten Tanggamus Sepanjang Tahun 2014

Beberapa instansi pemerintah daerah telah melakukan kajian tentang wilayah rawan konflik sosial baik untuk lingkup Kabupaten Tanggamus dan juga tingkat Provinsi Lampung. Sebagai gambaran, di 2014 yang lalu Polres Tanggamus melalui unit Intelkam telah melakukan Pemetaan Kerawanan dan Potensi Konflik Polres Tanggamus. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanggamus juga melakukan pemetaan tentang daerah potensi rawan konflik di Kabupaten Tanggamus tahun 2014. Adapun untuk level provinsi, di 2014 lalu Kesbangpol Provinsi Lampung juga telah melakukan kajian serupa hingga menghasilkan peta daerah konflik Provinsi Lampung.

Tabel 1. Data Daerah Potensi Rawan Konflik Kabupaten Tanggamus Tahun 2014

No.	Bidang	Latar Belakang	Lokasi
Berdasarkan Data Polres Tanggamus			
1.	Ekonomi	Sengketa lahan milik PT. Pertamina (kawasan industri maritim terpadu)	Kec. Kota Agung Timur
2.	Ekonomi	Konflik lahan	Kec. Kota Agung Timur
3.	Keamanan	Pelaku curanmor yang dihakimi massa hingga meninggal dunia	Kec. Bandar Negeri Semuong
Berdasarkan Data Kesbangpol			
1.	Sosial, budaya & keagamaan	Dominasi suku tertentu terhadap suku lainnya yang minoritas	Kec. Klumbayan dan Kec. Kota Agung Timur, dan; Kec. Wonosobo
2.	Sosial, budaya & keagamaan	Terdapat beberapa aliran kepercayaan yang berkembang	Kec.Gisting
3.	Sosial, budaya & keagamaan	Aktivitas kelompok keagamaan tertentu yang resahkan masyarakat	Kec. Talang Padang
4.	Sosial	Penolakan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan tertentu	Kec. Pugung
5.	Sumber daya alam	Penambangan batu oleh PT Sinar Intan Papua	Kec. Kota Agung Barat
6.	Sumber daya alam	Penambangan pasir oleh perusahaan menuai keberatan dari masyarakat	Kec. Wonosobo
7.	Sumber daya alam	Penambangan emas oleh PT. Natarang Mining	Kec. Bandar Negeri Semuong

No.	Bidang	Latar Belakang	Lokasi
8.	Sumber daya alam	Pembuangan limbah industri PT Pertamina Geothermal	Kec. Ulu Belu
9.	Sumber daya alam	Penggunaan jaring/pukat pursing (curshing) di perairan Kelumbayan	Kec. Kelumbayan
10.	Politik	Adanya dualisme kepemimpina pada beberapa partai politik	Kab. Tanggamus
11.	Pertanahan dan agraria	Konflik lahan rencana pembangunan Kawasan Industri Maritim Terpadu	Kec. Kota Agung & Kec. Limau
12.	Sengeketa lahan	Sengketa lahan miliki perusahaan dengan para penggarap	Kec. Kota Agung Timur
13.	Sumber daya alam	Perambah menggunakan lahan Register 25 Pematang Sanggang	Kec. Kelumbayan
14.	Sumber daya alam	Perambah menggunakan lahan Register 26 Serkung Peji	Kec. Kelumbayan
15.	Sumber daya alam	Perambah menggunakan lahan Register 27 Pematang Sulah	Kec. Cukuh Balak
16.	Sumber daya alam	Perambah menggunakan lahan Register 28 Pematang Neba	Kec. Kota Agung Timur; Kec. Talang Padang; Kec. Pugung, dan; Kec. Cukuh Balak
17.	Sumber daya alam	Perambah menggunakan lahan Register 30 Gunung Tanggamus	Kec. Kota Agung, Kec. Wonosobo, dan; Kec. Ulu Belu
18.	Sumber daya alam	Perambah menggunakan lahan Register 31 Pematang Arahan	Kec. Semaka
19.	Sumber daya alam	Perambah menggunakan lahan Register 32 Bukit Rindingan	Kec. Pulau Panggung
20.	Sumber daya alam	Perambah menggunakan lahan Register 39 Kota Agung Utara	Kec. Pulau Panggung
21.	Pertahanan dan keamanan	Rawan pembegalan dan pemalakan terhadap masyarakat	Kec. Bandar Negeri Semoung; Kec. Semaka, dan; Kec. Wonosobo
22.	Pertahanan dan keamanan	Rawan pungutan liar dan pemalakan terhadap kendaraan angkutan barang	Kec. Bandar Negeri Semoung; Kec. Wonosobo, dan; Kec. Kota Agung Timur

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2015.

Analisis (Potensi) Konflik Sosial di Kabupaten Tanggamus

Secara geografis, Kabupaten Tanggamus memiliki cakupan wilayah yang cukup luas. Berkaca dari situasi tersebut maka hal ini dapat menjadi dua sisi yang cukup kontras. Pada satu sisi, kondisi tersebut dapat menjadi peluang dan atau penghambat, bahkan pada sisi lainnya dapat juga menjadi ancaman dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Terkait dengan kemungkinannya terjadi konflik sosial ditengah masyarakat di Kabupaten Tanggamus, beberapa peneliti terdahulu telah memberikan gambaran bahwa konflik juga dapat disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, politik dan ekonomi (Fisher, 2000; Suharno, 2006; Verstegen, n.d.).

Jangkauan wilayah dari ibukota kabupaten ke beberapa wilayah paling luar di Tanggamus harus mampu disiasati dengan penyediaan infrastuktur fisik dan non fisik yang

mudah dijangkau/digunakan oleh masyarakat. Sebagai gambaran, terdapat beberapa wilayah terluar yang bila ditelusuri dengan peta berada diujung Kabupaten Tanggamus, misal wilayah Belimbing dan Tampang yang berada di Kecamatan Pematang Sawa, serta wilayah Kiluan yang ada di Kecamatan Kelumbayan. Dengan beragamnya kelompok etnik yang ada dalam struktur masyarakat, maka segenap stakeholders terkait harus mampu mengupayakan penciptaan kohesi sosial secara masif di tengah masyarakat.

Gambar 5.1 Peta Daerah Konflik Provinsi Lampung Tahun 2014

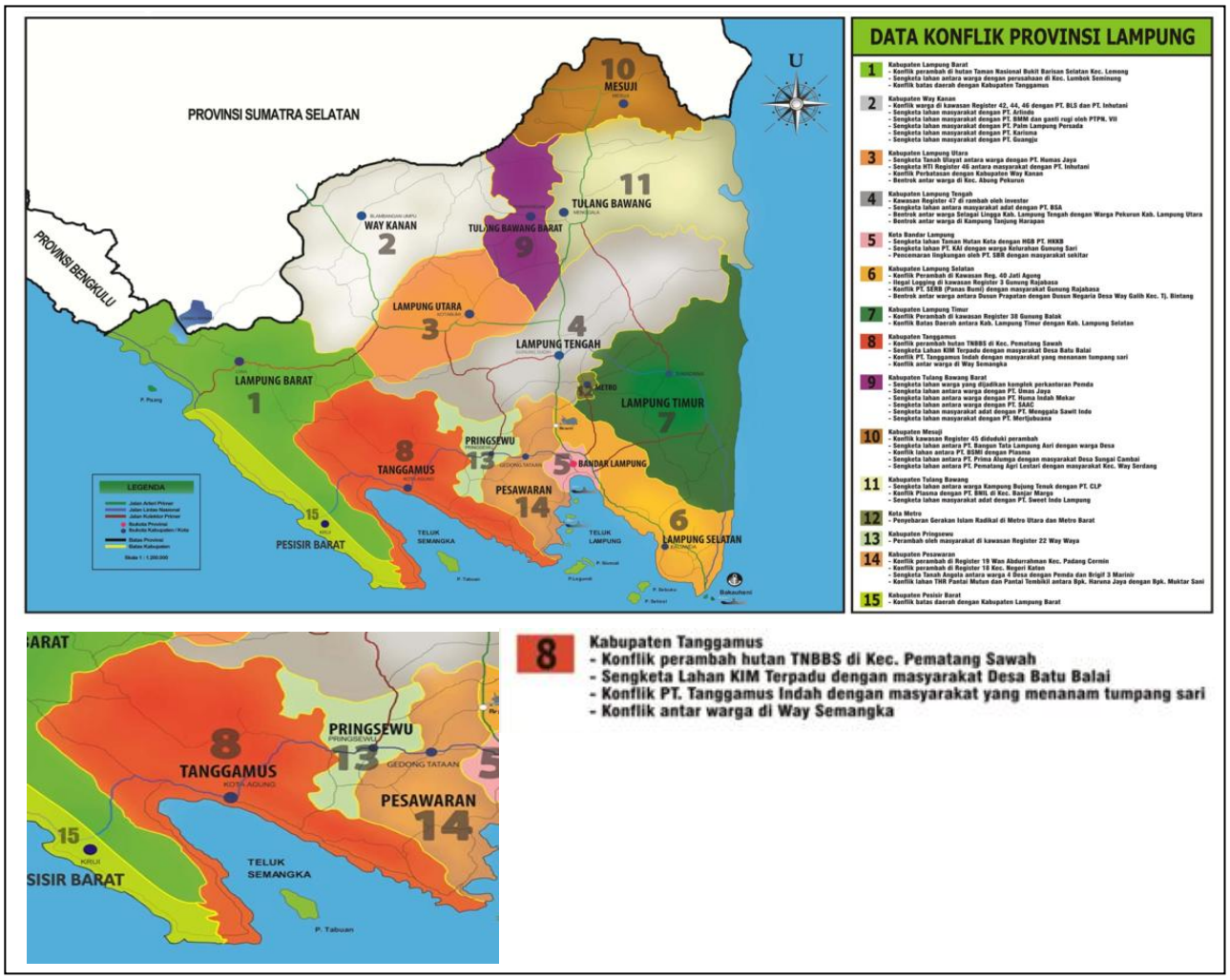

Sumber: Kesbangpol Provinsi Lampung, 2014

Merujuk data di tahun 2014, potensi konflik sosial di Kabupaten Tanggamus mengindikasikan pada perebutan sumberdaya dan situasi sosial keamanan ditengah masyarakat tidak berjalan kurang begitu baik. Hal ini memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan di tengah masyarakat, mulai dari keresahan menjadi korban kejahatan, produktivitas masyarakat yang tidak optimal, hingga kerugian harta benda lainnya. Konflik-konflik terjadi dapat karena persaingan dalam berbagai sektor, khususnya dalam akses sumberdaya alam dan ekonomi. Pada konteks lain, masyarakat yang beragam dengan latar belakang budaya, juga memiliki potensi konflik sosial yang lazimnya disebabkan oleh perbedaan adat istiadat dan budaya, perbedaan agama/keyakinan, belum optimalnya akulturasi antarbudaya sehingga rendahnya toleransi antarsesama, belum optimalnya upaya

kerjasama dan kehidupan bersama antarkelompok etnis di tengah masyarakat, dan kesenjangan ekonomi hingga kecemburuan sosial.

Fakta tersebut memiliki nilai potensial untuk terjadinya konflik terbuka di tengah masyarakat. Banyak kasus telah memperlihatkan bahwa konflik sosial yang kerap terjadi dengan melibatkan antar kelompok ditengah masyarakat dipicu oleh faktor tertentu yang dianggap sepele. Bila telah terjadi peristiwa konflik sosial secara terbuka, maka kecenderungan yang berikutnya, amuk massa atau saling serang antara kelompok warga yang satu terhadap kelompok warga lainnya akan sangat mudah terjadi.

Dapat dikatakan bahwa konflik sosial yang terjadi karena pihak yang terlibat tidak saling memahami satu sama lain. Bila diamati secara mendalam, nilai-nilai universal ditengah masyarakat saling dipinggirkan dan cenderung mengedepankan ego. Munculnya sikap anti sosial ditengah kelompok yang bertikai muncul diakibatkan oleh ego kelompok masing-masing. Pemaknaan nilai-nilai universal ditengah masyarakat mengalami pergeseran.

Potensi konflik sosial yang ada di Kabupaten Tanggamus harus mampu dimanajemen sebaik mungkin agar dampak dari potensi konflik tersebut tidak meluas pada skala yang lebih besar. Sebagai gambaran, pada kasus sengketa lahan di Kec. Kota Agung Timur, perangkat daerah yang ada di wilayah tersebut harus mampu memainkan perannya sebagaimana mestinya secara optimal. Pendekatan yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah yakni pencapaian kesepakatan diantara pihak yang terlibat konflik melalui beberapa metode penyelesaian, yakni cara musyawarah, dengan cara mediator, dengan hukum adat dan bahkan dengan hukum formal. Pendekatan tersebut dapat digunakan pada beragam isu potensi konflik lainnya yang ada di Kabupaten Tanggamus.

Mencermati proses penanganan konflik sosial yang dilakukan oleh perangkat daerah yang ada juga memiliki beberapa catatan tersendiri. Diperlukan kerjasama yang terjalin dengan baik antara perangkat pemerintah daerah di Kabupaten Tanggamus dengan unsur lembaga kemasyarakatan yang ada. Revitalisasi lembaga kemasyarakatan, baik lembaga adat dan lembaga sosial lainnya, perlu didukung oleh pemerintah daerah. Revitalisasi yang dimaksud yakni dapat berupa peningkatan kapasitas lembaga agar kelak mampu memainkan peran yang lebih baik dan signifikan di tengah masyarakat dalam upaya penciptaan perdamaian. Menjadikan lembaga kemasyarakatan sebagai partner pemerintah daerah dalam menginformasikan dinamika kehidupan di tengah masyarakat juga memiliki nilai yang positif. Berangkat dari strategi tersebut akan mudah dikenali potensi konflik sedini mungkin yang barangkali ada di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, strategi penguatan jaringan komunikasi antar elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menyikapi potensi konflik sosial perlu mengakomodir berbagai aspirasi dari beragam kalangan. Langkah nyata yang dapat dilakukan diantaranya dengan: 1) melakukan pendekatan dengan kalangan tokoh pada tiap wilayah baik tokoh agama, masyarakat, adat, dan pemuda; 2) Sinergisitas program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui beragaram kegiatan (misal: program keserasian sosial dan program penguatan kearifan lokal) yang tujuannya ialah upaya menciptakan situasi kondusif pada wilayah potensi konflik sosial, dan; 3) membentuk pemuda pelopor perdamaian dan melakukan pendampingan secara intensif terhadap peran organisasi tersebut.

Menarik dicermati karakter (potensi) konflik sosial di Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini, konflik sosial yang ada dapat dilihat dari intensitas potensialnya berdasarkan dua kategori, yakni perbedaan akses vertikal dan horizontal antar kelompok sosial. Menurut Pelly (1993) akses vertikal diperoleh karena usaha, seperti penghasilan (ekonomi),

pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosiopolitik. Sedangkan akses horizontal dimiliki karena warisan, seperti etnik dan ras atau asal usul keturunan, bahasa daerah, adat-istiadat/perilaku, agama, pakaian/makanan, dan budaya material lainnya. Semakin berhimpit di antara kedua faktor tersebut, maka potensi konfliknya tinggi semakin tinggi.

Pada beberapa kasus, terlihat bahwa tidak semua konflik-konflik sosial yang terjadi bersifat otonom atau berdiri sendiri berdasarkan satu faktor tertentu. Artinya, konflik yang terjadi pada faktor yang satu bisa membias (berhimpitan) pada faktor yang lain. Sejalan dengan pendapat Pelly (1993) dapat dinyatakan bahwa semakin banyak dan tajam perbedaan antar kelompok sosial, maka situasinya semakin rawan konflik.

Pertama, konflik yang timbul berdasarkan faktor psikososial bisa membias pada konflik antar kampung dan antar etnik. Tidak ada kesepakatan dalam menyelesaikan konflik akibat tindakan kekerasan terhadap warga yang diduga melakukan tindak kejahatan (mencuri, membegal, memalak), apalagi yang menimbulkan korban luka-luka bahkan meninggal dunia, mudah berkembang menjadi amuk massa yang bernuansa etnik. Kedua, konflik dapat bersumber dari faktor ekonomi kemudian membias pada faktor psikososial dan nilai-nilai (etnik). Ketiga, konflik yang terjadi karena ketidakjelasan data, seperti batas kepemilikan tanah, dapat berkembang menjadi konflik berdasar faktor psikososial. Keempat, konflik yang terjadi berdasarkan perbedaan nilai-nilai kultural berkembang pada faktor kepentingan. Kelima, konflik dapat terjadi saling terkait terkait antara faktor kepentingan ekonomi dan politik, serta struktural. Keenam, konflik dapat terjadi karena keterkaitan antara faktor kesalahan data dengan kepentingan ekonomi. Ketujuh, konflik dapat terjadi karena keterkaitan antara faktor kepentingan politik dengan faktor psikososial. Kedelapan, keterkaitan antara faktor kesalahan data dengan faktor perbedaan etnik.

Menyimak penjelasan tentang beragam kasus konflik sosial di atas, tampak bahwa konflik-konflik sosial horizontal yang terjadi cenderung bersifat ekspresif, spontan dan tidak terorganisir dengan baik, sedangkan konflik konflik-konflik vertikal cenderung bersifat instrumental dan terorganisir lebih jelas. Konflik-konflik horizontal dan ekspresif sejauh tidak berhimpitan dengan persoalan struktural cenderung lebih mudah diselesaikan daripada konflik instrumental. Konflik-konflik instrumental terjadi karena berhadapan dengan kelompok atau institusi yang memiliki kekuatan (*power*) dalam bentuk dominasi ekonomi dan politik yang lebih besar.

Selain itu, konflik-konflik yang berkelanjutan, berkepanjangan, atau konflik akumulatif, baik yang terjadi pada konflik horizontal maupun vertikal, memiliki beberapa karakteristik yang sama dan dapat dibagi dalam tiga kategori utama. Pertama, konflik terjadi di suatu tempat yang sama dengan aktor yang sama. Kedua, konflik terjadi di tempat yang berbeda dengan aktor yang sama. Ketiga, konflik terjadi di tempat yang berbeda dengan aktor yang berbeda, yang pada dasarnya bersumber pada masalah yang sama. Konflik-konflik ekspresif dan instrumental juga memiliki karakter berdasarkan ketiga kategori tersebut.

Upaya Penanganan (Potensi) Konflik hingga Mekanisme Penyelesaiannya

Bila berkaca dari beberapa kasus potensi konflik yang ada di Kabupaten Tanggamus, terdapat indikasi bahwa ada potensi konflik bernuansa etnisitas yang butuh perhatian secara khusus oleh stakeholders terkait baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Merujuk pendapat Suharno (2006), konflik dan integrasi antar kelompok etnik dalam suatu masyarakat bagian dari proses dinamisasi, dimana terdapat kekuatan yang saling tarik

menarik antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dalam hal ini, ketika suatu kelompok etnik berkonflik, maka hal implisit yang terjadi didalamnya yakni terjadinya kohesi sosial ke dalam ditiap komunitas berkonflik. Lebih lanjut, Suharno (2006) juga menekankan bahwa terjadinya kohesi sosial yang ada di tengah masyarakat (yang tengah berkonflik) selanjutnya akan menimbulkan suatu fragmentasi sosial (*social fragmentation*) secara internal ditiap komunitas ketika sumberdaya yang ada (seperti: sumberdaya alam, ekonomi, politik, kekuasaan, simbol kultural) sangat terbatas dan diperebutkan diantara mereka yang berkonflik.

Keterlibatan para aktor (multistakeholder) dilingkungan pemerintahan daerah Kab.Tanggamus dalam membangun perdamaian sudah cukup baik, meskipun belum dapat diwujudkan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih berkembangnya konflik potensial dan masih banyak terjadi konflik sosial di masyarakat, dengan beragam faktor yang mendasarinya dan dengan beragam faktor pemicunya. Bahkan masih banyak terjadi konflik akumulatif dan berkepanjangan, terutama yang disebabkan oleh faktor ekonomi, seperti perebutan tanah pertanian atau lahan sengketa dengan perusahaan tertentu. Leboh lanjut, konflik-konflik tersebut bukan lagi antar kelompok etnik, tetapi juga antar kelompok masyarakat dalam etnik yang sama. Salah satu contoh, terjadi konflik antar kampung yang terdiri dari dua kelompok etnik tertentu dalam satu marga yang sama. Hal ini harus menjadi perhatian serius para pihak yang berkepentingan untuk cepat tanggap dalam merespon potensi konflik ini.

Peran aparat keamanan (Polri dan TNI) sangat diperlukan dalam penanganan konflik sosial mendatang, yaitu pada masa damai, pada masa pra konflik, pada proses penyelasaian konflik (perdamaian), dan pada masa pascakonflik. Perannya pada sampai saat ini sudah cukup memadai, terutama dalam mencegah dan dalam menyelesaikan konflik terbuka, tetapi perannya secara menyeluruh dalam lingkup penanganan konflik masih perlu ditingkatkan untuk semakin dikuatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tentu saja, peran yang mereka lakukan tidak terlepas dari sinergi dengan stakeholder yang lain, yaitu pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi rakyat, para tokoh masyarakat, dan pihak swasta, dan segenap elemen masyarakat lainnya.

KESIMPULAN

Kabupaten Tanggamus memiliki cakupan wilayah yang cukup luas antara satu wilayah dengan wilayah lain. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang dan atau penghambat, bahkan dapat juga menjadi ancaman dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu, penyediaan infrastuktur fisik dan non fisik yang mudah dijangkau/digunakan oleh masyarakat mesti menjadi perhatian khusus bagi kalangan stakesholders Pemkab Tanggamus. Terkait dengan konflik sosial di Kabupaten Tanggamus, bila merujuk pada data ditahun sebelumnya (2014), menujukkan bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki potensi konflik yang cukup mengkhawatirkan bila tidak dilakukan serangkaian upaya pencegahan konflik. Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanggamus mengidentifikasi terdapat 22 data wilayah dengan potensi konflik di wilayah ini. Selain itu, terdapat variasi latar belakang potensi konflik sosial di Kabupaten Tanggamus. Terlihat bahwa pada tiap kecamatan tersebut memiliki pola yang khas. Terdapat pada satu kasus potensi konflik yang bersumber dari faktor sosial, dan pada kasus yang lain bersumber faktor ekonomi hingga pertanahan/agraria.

SARAN

Orientasi pembangunan daerah perlu mengedepankan model pembangunan partisipatif. Hal ini dimaksudkan agar disparitas antar wilayah di Kabupaten Tanggamus dapat diminimalisir. Dalam hal ini, Pemkab Tanggamus perlu meningkatkan investasi sosial dan pendistribusian pelayanan sosial dasar yang lebih luas dan adil. Memfasilitasi dan meningkatkan peran lembaga sosial yang ada di tengah masyarakat. Pada aspek ini Pemkab memberikan tawaran program pengembangan masyarakat yang merangkul beragam elemen entitas yang ada. Tujuan dari program tersebut nantinya mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merealisasikan kepentingan-kepetingannya dengan memperhatikan keragaman/multikultur yang ada. Terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan, diperlukan peningkatan sinergisitas peran antara Pemkab Tanggamus dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan). Ada pemahaman yang seragam antara stakeholders yang ada di Kabupaten Tanggamus dalam upaya menciptakan kedamaian sosial. Selain itu, diperlukan upaya optimalisasi peran beragam kelompok atau organisasi sosial di masyarakat dalam upaya penciptaan kedamaian sosial di tengah masyarakat. Namun demikian, pihak terkait harus mampu melakukan identifikasi kelompok atau organisasi sosial mana yang punya kapasitas untuk menjalankan peran tersebut. Nantinya, peran yang dimainkan oleh kelompok atau organisasi sosial tersebut dapat juga diselaraskan dengan beberapa program yang dijalankan oleh stakesholders terkait dalam upaya menciptakan kedamaian sosial, misal: program keserasian sosial (pemerintah pusat), rembug pekon/anjau silau (pemerintah daerah), dsb. Pada tataran yang cukup aplikatif, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dapat mengimplementasikan Permendagri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, mulai dari: (a) Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten, (b) Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten, dan (c) Pembentukan Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Antaranews. (2012). *Konflik sosial di Indonesia semakin meningkat*. Accessed date: May 19, 2015. http://www.antaranews.com/berita/335047/konflik-sosial-di-indonesia-semakin-meningkat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung. (2014). *Peta daerah k.onflik Provinsi Lampung Tahun 2014.* Bandar Lampung: Kesbangpol Prov. Lampung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tanggamus. (2014). *Data daerah potensi rawan konflik Kabupaten Tanggamus Tahun 2014*. Kota Agung: Kesbangpol Kab. Tanggamus.

Fisher et al. (2000). *Mengelola konflik: ketrampilan dan strategi untuk bertindak*. Jakarta: The British Council.

JPNN. (2014, April 15). *Inilah daerah rawan konflik sosial di Indonesia*. accessed date: May 19, 2015. http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia-.

Jones, T.S. (2008). *"Conflict" encyclopedia of educational psychology.* Ed. Neil J. Salkind, Thousand Oaks, CA.: SAGE Publications. Inc.

Kepolisian Resor Tanggamus. (2014). *Data pemetaan kerawanan dan potensi konflik Polres Tanggamus tahun 2014*. Kota Agung: Kepolisian Resor Tanggamus.

Sumarno, S. dan Roebiyantho H. (2013). *Evaluasi program keserasian sosial dalam penanganan konflik sosial*. Jakarta: P3KS Press.

Pelly, Usman. 1993. *Pengukuran intensitas potensi konflik dalam masyarakat majemuk*. Jakarta: Analisa CSIS, Tahun XXII, No.3, Mei-Juni 1993.

Rudito, B. & Famiola, M. (2008). *Social mapping, metode pemetaan sosial, teknik memahami suatu masyarakat atau komuniti*. Bandung: Rekayasa Sains.

Setiadi, E.M. & Kolip, U. (2011). *Pengantar sosiologi, pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suharno. (2006). *Konflik, etnisitas dan integrasi nasional*. accessed date: June 23, 2015. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Karya%20B1%20-%20Konflik, %20Etnisitas%20dan%20Integrasi%20Nasional.pdf.

Suharto, Edi. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat, kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Verstegen, Suzanne. (n.d.). C*hapter 9: the causes and dynamics of poverty-related conflict.* accessed date: June 23, 2015. http://eeas.europa.eu/ifs/publications/articles/book1/book%20vol1_part1_chapter9_the%20causes%20and%20dynamics%20of%20poverty-related%20conflict.pdf.